



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL Jakarta IV  
**2025**

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL .....	VI
DAFTAR GAMBAR .....	VII
KATA PENGANTAR .....	VIII
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.....	1
C. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV .....	4
1. Pengelolaan kekayaan negara.....	5
2. Penilaian.....	5
3. Pengurusan Piutang Negara.....	5
4. Pelayanan Lelang .....	5
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN.....	6
D. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja.....	6
E. Sistematika Laporan .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Penetapan Kinerja 2025.....	10
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	18
1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya .....	18
2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal .....	21
3. Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.....	25
4. Sasaran Strategis 4: Penerapan tata Kelola aset yang efektif.....	26
5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan lelang yang professional dan produktif.....	28
6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif. ....	31
7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif.....	33
8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif .....	35
C. Realisasi Anggaran .....	37



---

D. Penghargaan .....	38
BAB IV PENUTUP .....	39
A. Simpulan Umum.....	39
B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang.....	39
LAMPIRAN .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia .....	4
Tabel 3. Jumlah Tenaga Fungsional KPKNL Jakarta IV .....	4
Tabel 4. Sasaran Strategis KPKNL Jakarta IV.....	11
Tabel 5. Perjanjian Kinerja 2026 .....	14
Tabel 6. DIPA 2026 KPKNL Jakarta IV .....	15
Tabel 7. IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jakarta IV Tahun 2025 .....	16
Tabel 8. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.....	18
Tabel 9. IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan .....	19
Tabel 10. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang .....	20
Tabel 11. Raw Data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang .....	20
Tabel 12. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara .....	22
Tabel 13. Persentase realisasi pokok lelang .....	23
Tabel 14. IKU Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara.....	24
Tabel 15. IKU Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.....	25
Tabel 16. Realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan .....	27
Tabel 17. IKU Presentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan.....	27
Tabel 18. Presentase evaluasi kinerja BMN.....	28
Tabel 19. Jumlah evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Jakarta IV.....	28
Tabel 20. IKU Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara .....	29
Tabel 21. Raw Data Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara .....	29
Tabel 22. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian .....	30
Tabel 23. IKU Presentase produktivitas lelang .....	31
Tabel 24. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.....	32
Tabel 25. IKU Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa.....	33
Tabel 26. IKU Presentase pengembangan kompetensi pegawai .....	33
Tabel 27. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.....	34
Tabel 28. Rincian Penanganan Permasalahan Hukum.....	34
Tabel 29. IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID).....	35
Tabel 30. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko .....	36
Tabel 31. IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM .....	37
Tabel 32. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja Berdasarkan Online Monitoring SPAN Per 31 Desember 2025.....	37
Tabel 33. IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN Per 31 Desember 2025.....	37
Tabel 34. Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja.....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pegawai KPKNL Jakarta IV.....	VIII
Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV.....	3
Gambar 3. Peta Strategi KPKNL Jakarta IV.....	11
Gambar 4. Sertifikat Penghargaan KPKL dengan Kinerja Layanan Penilaian Terbaik III.....	38

## KATA PENGANTAR



Gambar 1. Pegawai KPKNL Jakarta IV

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor ND-6/KN.1/2026 tanggal 1 Januari 2026 hal Permintaan Narasi LKj Kemenkeu-DJKN dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPKNL Jakarta IV pada Tahun 2025.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Score Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Jakarta IV dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2025. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV Tahun 2025 sebesar **116,80%**. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Jakarta IV sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2025.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2025 ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Jakarta IV. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab



dengan perbaikan yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Dengan semangat kerja cerdas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat kita selesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Jakarta IV yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Jakarta IV,



Ditandatangani secara elektronik  
Bambang Sulistyono

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2025-2029.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jakarta IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah **“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”**

. Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV adalah sejalan dan menyesuaikan dengan tujuan DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan
3. Layanan lelang modern dan terpercaya
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap IKU yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta IV. Sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2025.

Sasaran strategis satu yaitu sasaran strategis **Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya** yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: **(1)** Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna Layanan dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar 100%; **(2)** Indeks Integritas dengan target Tahun 2025 adalah 100; **(3)** Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp85.917.460.000,00 dengan persentase 100%. IKU ini berasal dari penerimaan PNBPN dari Pengelolaan BMN, PNBPN dari Piutang Negara dan PNBPN Lelang.

Sasaran strategis dua yaitu **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**. Terdapat 3 (tiga) IKU yaitu **(1)** Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dengan target untuk tahun 2025 sebesar 100%; **(2)** Presentase realisasi pokok lelang dengan target tahun 2025 sebesar 100%, atau sebesar Rp652.000.000.000,00; **(3)** Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang **negara** dengan target tahun 2025 sebesar 100% atau sebesar Rp200.000.000.000,00.

Sasaran strategis tiga yaitu **Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**. Terdapat 1 (satu) IKU yaitu **(1)** Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target tahun 2025 sebesar 74.

Sasaran strategis keempat yaitu **Penerapan tata kelola aset yang efektif** terdapat 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Persentase bidang tanah BMN yang disertipatkan dengan target IKU pada tahun 2025 adalah 100% atau sebanyak 44 bidang tanah, sedangkan realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah 120% atau sebanyak 53 bidang tanah BMN. **(2)** Evaluasi kinerja BMN dengan jumlah aset yang dievaluasi kinerja dan disampaikan oleh satker Adapun target tahun 2025 adalah sebesar 100% atau

rekomendasinya sebanyak 109 dan Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Satker adalah sebanyak 11. Di tahun 2025, realisasi IKU ini adalah 120%.

Sasaran strategis kelima yaitu **Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif** yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu **(1)** Persentase Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan target di tahun 2025 adalah 100% atau sebanyak 400 BKPN. **(2)** Tingkat kualitas layanan penilaian dengan target pada tahun 2025 sebesar 70% **(3)** Persentase produktivitas lelang dengan target untuk tahun 2025 adalah sebesar 80%.

Sasaran strategis keenam yaitu **Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**, terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu **(1)** Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar 120% dari target 100%; **(2)** Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar 100 **(3)** Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan target tahun 2025 sebesar 80%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu **Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Indeks penanganan permasalahan hukum dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar 100%; **(2)** Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar 80.

Sasaran strategis kedelapan yaitu **Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**. Terdapat 2 (dua) IKU pada sasaran strategis ini yaitu **(1)** Indeks kualitas manajemen kinerja dan risikodengan target tahun 2025 sebesar 80 **(2)** Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan target tahun 2025 sebesar 100.



# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV
- C. Peran Strategis KPKNL Jakarta IV
- D. Permasalahan Utama Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
- E. Sistemanka Laporan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

KPKNL Jakarta IV merupakan unit Eselon III di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai instansi vertikal pada DJKN, KPKNL Jakarta IV dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Jakarta IV dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;

- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL, terdapat subbagian, seksi serta jabatan fungsional yang memiliki tanggungjawab berbeda-beda. Struktur organisasi pada KPKNL Jakarta IV, yaitu terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;  
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c. Seksi Piutang Negara;  
Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d. Seksi Hukum dan Informasi;  
Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan

rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e. Seksi Kepatuhan Internal; dan

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang yang digelutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada KPKNL Jakarta IV, terdapat tiga Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Pelelang, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)



Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta IV didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Jakarta IV adalah sebanyak 41 pegawai dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

## I. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	-	-	-	-	0
3.	SLTA	-	-	1	-	1
4.	DI/DII	-	-	2	-	2
5.	DIII	-	2	2	-	4
6.	DIV/Sarjana	-	3	21	1	25
7.	Pasca Sarjana/ Master	-	-	4	5	9
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>41</b>

## II. Berdasarkan Usia

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	5	3	-	8
31-40	-	-	7	-	7
41-50	-	-	13	4	17
diatas 50	-	-	7	2	9
Jumlah	0	5	30	6	41

## III. Tenaga Fungsional

Tabel 3. Jumlah Tenaga Fungsional KPKNL Jakarta IV

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Pranata Keuangan APBN	1
2.	Pelelang	6
3.	Penilai Pemerintah	4
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>

## C. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta IV memiliki peran strategis sebagai berikut:

## 1. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Jakarta IV turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta IV selaku *asset manager* yang efektif dan produktif mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

## 2. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara, setelah itu dilakukan inventarisasi menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

## 3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang berasal dari BLU dan instansi pemerintah.

## 4. Pelayanan Lelang

Berlakunya PMK Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang

merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penawaran lelang melalui elektronik (*email*) dan internet (*e-auction*) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. *E-auction* dapat dilaksanakan untuk semua jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. *E-auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui *browser* pada alamat [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Selain dengan komputer atau laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui telepon pintar berbasis android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang internet dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

## 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### D. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah mengakibatkan kegiatan *survey asset* yang masuk target portofolio aset belum bisa dilaksanakan 100%;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada satuan kerja terkait pengisian form pendataan portofolio aset untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengisian form pendataan;
3. Peningkatan pemahaman pada satuan kerja untuk melakukan penginputan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset;
4. Beberapa Debitur tidak ditemukan keberadaannya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu;
5. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;

6. Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena bencana *Covid-19*;
7. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

## **E. Sistematika Laporan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

### **1. Ikhtisar Eksekutif**

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

### **2. Bab I Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Peran KPKNL Jakarta IV, dan sistematika laporan.

### **3. Bab II Perencanaan Kinerja**

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja yang tercantum dalam Penetapan Perjanjian Kinerja

### **4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Bagian ini menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang meliputi analisis dan evaluasi kinerja KPKNL Jakarta IV dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **5. Bab IV. Penutup**

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Jakarta IV di tahun yang akan datang.

An abstract graphic design featuring a large, stylized shape in shades of blue and green, set against a background of white, yellow, and orange. The shape resembles a stylized letter 'L' or a similar geometric form. The background is divided into horizontal bands of white, yellow, and orange, with the blue and green shape overlapping these bands.

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstra 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut, ditetapkan juga Keputusan Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor KEP-263/WKN.07/KNL.04/2020 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun 2020-2024. Visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”

Pengertian visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.

3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan tersebut, KPKNL Jakarta IV telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Jakarta IV, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberi manfaat ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai Tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV melaksanakan program yaitu:

- Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan BMN dan lelang kepada seluruh Satuan Kerja binaan KPKNL Jakarta IV;

- Melaksanakan *e-rekon* dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistem;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman/persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- Apel Pagi, yang dilaksanakan secara periodik untuk pegawai KPKNL Jakarta IV;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta IV untuk mengikuti diklat teknis maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Membuat berbagai sistem aplikasi guna memudahkan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai di KPKNL Jakarta IV.

## B. Penetapan Kinerja 2025

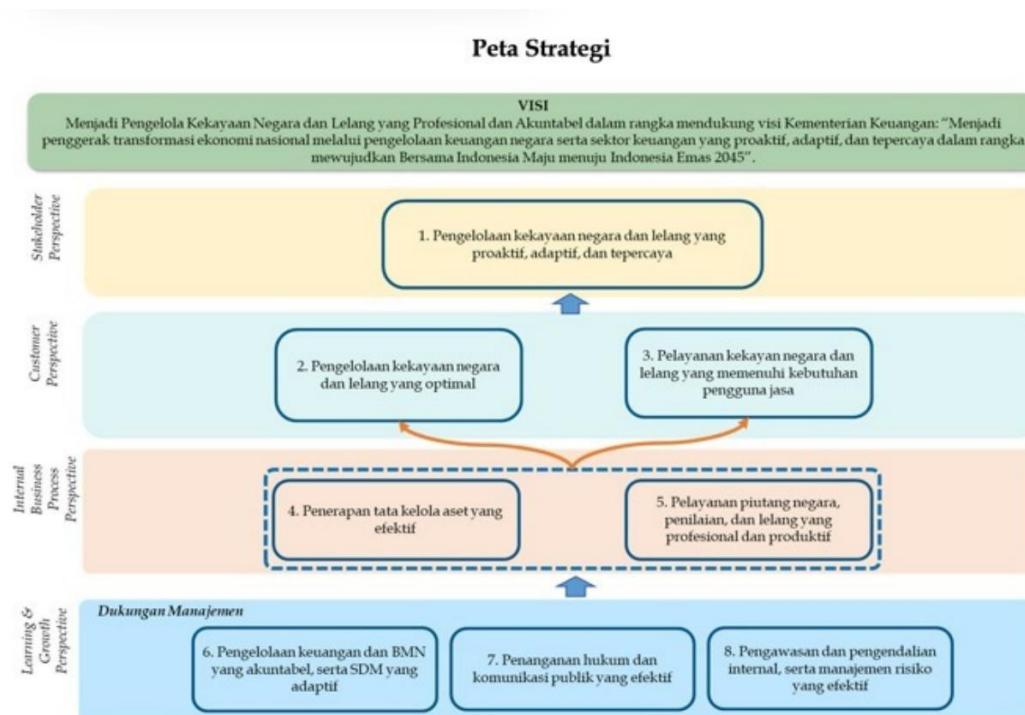
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan

suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi KPKNL Jakarta IV

Peta strategi Kemenkeu-*three* Tahun 2025 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 8 (delapan) sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU).

Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan realisasi tahun sebelumnya, serta target 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Strategis KPKNL Jakarta IV

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>			
<b>PENGLOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG PROAKTIF, ADAPTIF, DAN TERPERCAYA</b>			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	%	112,19%	100%
2. Indeks Integritas	Indeks	92,44	100
3. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	130,75%	100%

**SASARAN STRATEGIS 2  
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1. Tingkat Optimalisasi pengelolaan aset negara	%	N/A	100%
2. Presentase relaisasi pokok lelang	%	72,16%	100%
3. Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang	%	N/A	100%

**SASARAN STRATEGIS 3  
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI KEBUTUHAN PENGGUNA JASA**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	N/A	74

**SASARAN STRATEGIS 4  
PENERAPAN TATA KELOLA ASET YANG EFEKTIF**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1. Presentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan	%	122,58%	100%
2. Presentase evaluasi kinerja BMN	%	121,38%	100%

**SASARAN STRATEGIS 5  
PELAYANAN PIUTANG NEGARA, PENILAIAN, DAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN PRODUKTIF**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1. Presentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	%	N/A	100%
2. Tingkat kualitas layanan penilaian	%	N/A	70%
3. Presentase produktivitas lelang	%	126,43%	80%

**SASARAN STRATEGIS 6  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG AKUNTABEL, SERTA SDM YANG ADAPTIF**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1. Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	120%	100
2. Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	N/A	100
3. Presentase pengembangan kompetensi pegawai	%	113%	80%

<b>SASARAN STRATEGIS 7 PENANGANAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>
1. Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	N/A	100
2. Indeks pengelolaan layanan informasi public (PPID)	Indeks	112	80

<b>SASARAN STRATEGIS 8 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL, SERTA MANAJEMEN RISIKO YANG EFEKTIF</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target 2025</b>
1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	98,85	80
2. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indeks	N/A	100

Ket: \* N/A = tidak tersedia, penjelasan akan disajikan dalam uraian sasaran strategis

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan dikelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

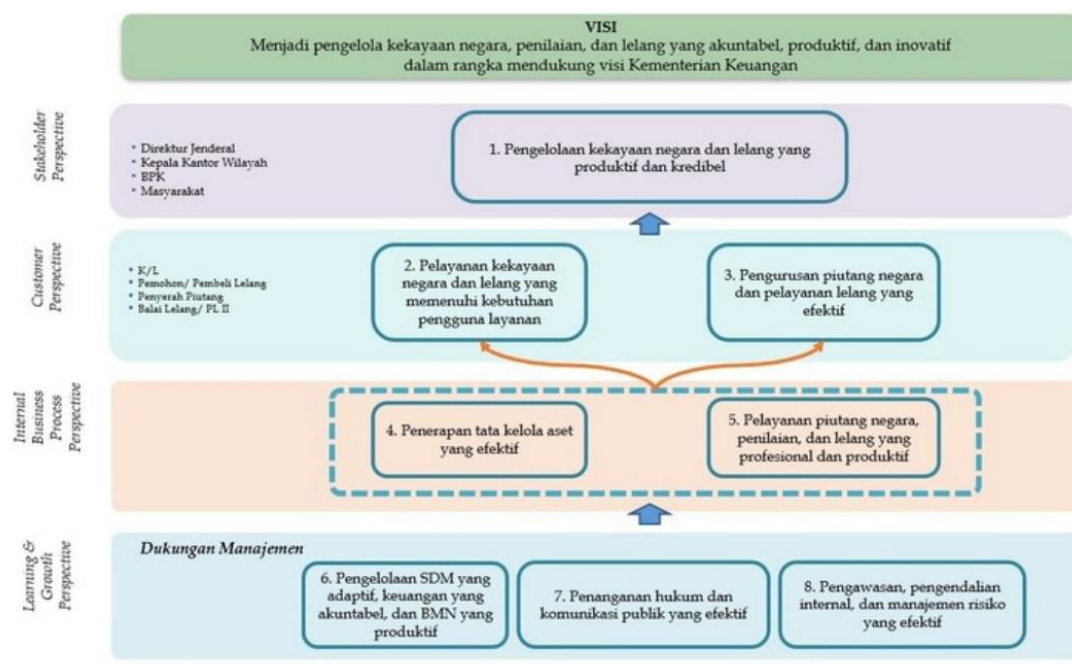
1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian kinerja Tahun 2026 KPKNL Jakarta IV telah disusun dan ditetapkan pada 31 Januari 2026. Sebagaimana perjanjian kinerja di tahun 2025, Tujuan strategis yang merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis,

indikator kinerja dan target kinerjanya telah dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2026 sebagai berikut:



Peta strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2026 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholder perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 8 (delapan) sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU).

Adapun rincian dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan target kinerja 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
2	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang
			100
			100% (Rp79,5M)
			100%
			80%
			100%
			(Rp240M)
			100%
			(Rp491,8M)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV memiliki DIPA 2026 dalam melaksanakan berbagai program dengan rincian:

Tabel 6. DIPA 2026 KPKNL Jakarta IV

Program/Kegiatan 2026	Anggaran
Program: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp1.202.901.000,00
Kegiatan:	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp131.672.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp1.701.229.000,00
Program: Dukungan Manajemen	Rp1.626.114.000,00
Kegiatan:	
1. Legalisasi dan Litigasi	Rp70.504.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.517.170.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp16.610.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21.830.000,000



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- C. Realisas Anggaran
- D. Penghargaan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, terhadap 19 (16 profesi belas) IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Tahun 2025 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV sebesar 116,80%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (16 profesi belas) IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jakarta IV Tahun 2025 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 7. IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jakarta IV Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
<b>SS 1</b> Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120	120
	1.2 Indeks Integritas	100	105,32	105,32	105,32
	1.3 Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	120,03%	120,03	120
<b>SS 2</b> Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	120%	120	120
	2.2 Persentase realisasi pokok lelang	100%	93,02%	93,02	93,02
	2.3 Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	113,22%	113,22	113,22
<b>SS 3</b> Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	117,50	158,78	120

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja	
<b>SS 4</b> Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	120,45%	120,45	120
	4.2	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120	120
<b>SS 5</b> Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	140,85%	140,85	120
	5.2	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	108,30%	154,71	120
	5.3	Persentase produktivitas lelang	80%	97,30%	121,62	120
<b>SS 6</b> Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
	6.2	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	125,22	120
	6.3	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	122,50	120
<b>SS 7</b> Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,98	113,98	113,98
	7.2	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	115,25	144,06	120
<b>SS 8</b> Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	97	121,25	120
	8.2	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	131,71	131,71	120

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2025, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Tahun 2025 sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan terdapat **3 (tiga) IKU** yaitu: (1) Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan; (2) Indeks Integritas.; dan (3) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

#### IKU 1.1: Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Semakin baik pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Dengan target 100% dan realisasi sebesar 120%. Adapun capaian IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120%	120%	
Capaian	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120%	120%	

#### IKU 1.2: Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2025 melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d. Q4 tahun 2025. Integritas dianggap sangat di perlukan sehingga diatur kriteria pengukuran atas Integritas yang ada di KPKNL Jakarta IV. Dengan target

pada tahun 2025 sebesar 100, capaian realisasi atas IKU tersebut oleh KPKNL Jakarta IV adalah sebesar 105,32. Adapun Capaian IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	120	120	120	120	120	105,32	105,32	

### IKU 1.3: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara menurut definisi adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Jakarta IV berasal dari:

#### 1) PNBP Pengelolaan BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- Pemanfaatan barang milik negara; dan
- Pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

#### 2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (BIAD PN) yang diupayakan oleh KPKNL.

### 3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- Biaya permohonan lelang;
- Uang jaminan pembeli wanprestasi;
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar.

Capaian penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar 120,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1c-CP Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	268,09%	120,54%	120,54%	121,94%	121,94%	120,03%	120,03%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Selanjutnya, dapat kami sampaikan terkait raw data capaian atas realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut:

Tabel 11. Raw Data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
PNBP Aset	52.807.460.000,00	76.999.333.566,00	145,81%
PNBP Lelang	27.610.000.000,00	17.574.447.676,00	63,65%
PNBP PN	5.500.000.000,00	8.554.312.105,00	155,53%
<b>Total PNBPN</b>	<b>85.917.460.000,00</b>	<b>103.128.093.347,00</b>	<b>120,03%</b>

Tantangan dalam pencapaian target, antara lain:

- Untuk pencapaian PNBPN pengelolaan Kekayaan Negara/BMN, Terdapat persetujuan pengelolaan yang belum ditindaklanjuti oleh satker, Adanya pemanfaatan BMN pada K/L yang belum mendapat persetujuan pengelola barang, masih ada penjualan BMN melalui lelang yang tidak ada peminat (TAP) dan wanprestasi.

- Untuk pencapaian PNBPN piutang negara, sebagian besar Penanggung Utang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utangnya yang disebabkan itikat baik PH kurang, Banyak debitur yang tidak ditemukan keberadaannya, dan aset kredit eks BDL tidak data diberikan keringanan hutang.
- Untuk pencapaian PNBPN lelang, masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan.

Dalam rangka menindaklanjuti tantangan yang ada, KPKNL Jakarta IV telah melakukan beberapa rencana aksi, diantaranya:

- a. Untuk pencapaian PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara: Mendorong satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan dan pemindahtangananMelakukan wasdal atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh KPKNLMengirimkan surat ke satker yang masuk BLU untuk rekapitulasi realisasi PNBPN dari BLU
- b. Untuk pencapaian PNBPN Lelang: - melakukan penggalan potensi lelang eksekusi harta pailit yang memiliki bodel berupa jaminan atas nama debitur- melakukan kordinasi intensif dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena memiliki potensi lelang barang rampasan untuk diajukan ke KPKNL Jakarta IV
- c. Untuk pencapaian PNBPN Piutang Negara: 1. Melaksanakan Penelitian Lapangan dan Penyampaian Surat Paksa dengan debitur hutang diatas 50 Juta 2. Melakukan Permintaan Perbantuan Penelitian Lapangan dan Penyampaian Surat Paksa pada KPKNL Wilayah Kerja Lain3. Pemanggilan Penanggung Hutang terkait upaya penyelesaian hutang

## 2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Berdasarkan Bagian Ke-delapan Pasal 32, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkup pengelolaan kekayaan negara, DJKN turut berperan dalam melaksanakan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang. Dalam sasaran ini, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang optimal adalah pengelolaan piutang negara yang efektif mencakup proses identifikasi, penagihan, dan penyelesaian piutang. Selain itu layanan lelang diharapkan dapat mendorong peran penegakan hukum serta penguatan keuangan negara melalui layanan lelang yang transparan, efektif, dan akuntabel. Terdapat 3 (tiga) IKU pada Sasaran Strategis ini, yaitu:

### IKU 2.1: Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang strategis, aset negara dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

IKU Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dimaksudkan untuk mengukur peningkatan penggunaan BMN terhadap BMN yg terindikasi *under-utilized* berdasarkan pengukuran SBSK pada periode sebelumnya. Adapun kriteria *underutilized* yang menjadi target yaitu BMN dengan tingkat kesesuaian SBSK di bawah 50%. Selanjutnya bentuk-bentuk peningkatan penggunaan BMN adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penggunaan aset, yaitu utilisasi aset dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi (penggunaan sendiri, penggunaan bersama, dan penggunaan sementara);
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset, yaitu utilisasi oleh pihak ketiga (pemerintah atau swasta, seperti: sewa, pinjam pakai, dan bentuk pemanfaatan lainnya).

Adapun capaian IKU Optimalisasi pengelolaan aset negara adalah sebagai berikut:

Tabel 12. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

K-Three	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	86,67%	113,67%	113,67%	126,25%	126,25%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## IKU 2.2 : Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Pada tahun 2025, Target IKU realisasi pokok lelang adalah sebesar 100% dan realisasi capaian sebesar 93,02% yaitu sebesar Rp606.458.313.721,00 dari target Rp652.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Persentase realisasi pokok lelang

K-Three	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	277,43%	64,41%	64,41%	89,86%	89,86%	93,02%	93,02%	
Capaian	120%	64,41%	64,41%	89,86%	89,86%	93,02%	93,02%	

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain dikarenakan tingkat daya laku lelang eksekusi yang rendah atau masih banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP) khususnya lelang eksekusi hak tanggungan, Aset milik pihak ketiga sulit dieksekusi melalui lelang harta pailit karena disyaratkan adanya dokumen asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik terpailit, yang ternyata pada prakteknya sulit dipenuhi oleh pemohon lelang Kurator.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku.
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Mengajukan usulan perubahan PMK 122 Tahun 2023 khususnya pengecualian persyaratan dokumen berupa asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen

lain yang menyatakan aset merupakan milik terpailit dikecualikan Aset pihak ketiga yang terikat jaminan kebendaan dari Kreditur Separatis, Jika perlu, ditambahkan dokumen berupa Surat Pernyataan dari Kreditur Separatis bahwa telah menyerahkan secara sukarela pemberesan harta pailit kepada Kurator melalui eksekusi lelang dan akan bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana dari pemilik jaminan obyek lelang

- e. Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Jakarta IV.

### IKU 2.3 : Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Persentase penurunan outstanding piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU persentase penurunan outstanding piutang negara, yaitu untuk seluruh Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS), Penarikan, Pengembalian, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan Keringanan Utang.

Adapun realisasi IKU persentase penurunan outstanding piutang negara KPKNL adalah sebesar 113,22% yaitu Rp226.446.927.397,00 dari target 100% atau sebesar Rp200.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. IKU Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

K-Three	2.Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	98,48%	50,11%	50,11%	52,26%	52,26%	113,22%	113,22%	
Capaian	98,48%	50,11%	50,11%	52,26%	52,26%	113,22%	113,22%	

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Sebagian besar Penanggung Utang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran.
- Banyak debitur yang tidak ditemukan keberadaannya
- Piutang dari Aset kredit eks BDL tidak dapat diberikan keringanan hutang.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan yang ada, antara lain:

- Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
- Meningkatkan/mengoptimalkan tahap pengurusan piutang negara;
- Melaksanakan Penelitian Lapangan dan Penyampaian Surat Paksa dengan debitur hutang diatas 50 Juta
- Melakukan Permintaan Perbantuan Penelitian Lapangan dan Penyampaian Surat Paksa pada KPKNL Wilayah Kerja Lain (Tangerang, Bogor, Bekasi)

### 3. Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa merupakan rangkaian layanan publik yang diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka pengelolaan kekayaan negara serta pelaksanaan lelang. Pelayanan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna jasa, baik instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kepastian hukum, efisiensi, dan kualitas layanan yang berkelanjutan.

#### IKU 3.1: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dari target sebesar 74, KPKNL Jakarta IV mencapai realisasi sebesar 120% dengan nilai edukasi dan komunikasi sebesar 117,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. IKU Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

K-Three	3.Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/AVG
Realisasi	110	120	120	116,67	116,67	117,50	117,50	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

#### 4. Sasaran Strategis 4: Penerapan tata Kelola aset yang efektif

##### IKU 4.1: Presentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain itu, juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa tanah, dengan pembagian tugas/kewajibannya masing-masing.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan berupa pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian IKU ini adalah:

1. Masih adanya penghunian oleh pihak ketiga (Bareskrim Polri, Birolog Polda);
2. Masih adanya proses di pengadilan atas kepemilikan (Korpolairud);
3. Sertipikat hak guna bangunan atas nama pemilik lama dan belum ada pelepasan hak (Yanma Polri, Yanma Polda, Setjen Kemendagri);
4. Masih terdapat permasalahan terkait pembayaran ganti rugi atas bangunan pihak ketiga yang pernah berdiri di atas tanah BMN (Lemhannas);
5. Di atas tanah BMN terdapat penghunian oleh pihak ketiga dan beberapa diantaranya telah terbit SHM (Setjen Kemenperin, Ditjen Imigrasi);
6. Sertipikat lama masih dikuasai pemilik tanah sebelumnya karena terindikasi pelunasan tanah belum selesai (KemenKUKM);
7. Terdapat HPL atau hak pengelolaan oleh Kementerian Setneg di atas tanah BMN dan belum mendapat rekomendasi pelepasan haknya (Basarnas).

KPKNL Jakarta IV melakukan koordinasi dengan satker dan Kantor Pertanahan untuk percepatan penuntasan sertifikasi BMN sebagai langkah penyelesaian tantangan atas pencapaian IKU dimaksud.

Pada tahun 2025, capaian pensertipikatan BMN pada KPKNL Jakarta IV adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
K1		10	
K2		10	
K3	44	33	53
K4		0	

Adapun capaian IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah sebesar 120,45% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. IKU Presentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

K-Three	4.Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Presentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	34,09%	72,73%	72,73%	79,55%	79,55%	120,45%	120,45%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

#### IKU 4.2: Presentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung.

Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset. Adapun capaian atas IKU evaluasi kinerja BMN adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 18. Presentase evaluasi kinerja BMN*

K-Three	4.Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Presentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	23,16%	86,43%	86,43%	94,05%	94,05%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun rincian jumlah evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Jakarta IV adalah sebagai berikut:

*Tabel 19. Jumlah evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Jakarta IV*

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker	109	266	244,04%
Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti satker	11	210	1909,09%

#### 5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan lelang yang professional dan produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara, penilaian dan lelang. Penerapan tata kelola piutang negara, pelayanan penilaian dan pelaksanaan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara, pelayanan penilaian serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi

### IKU 5.1: Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Tantangan pencapaian IKU ini adalah rendahnya jumlah penyerahan BKPN baru, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain:

- melakukan penggalan potensi Piutang daerah baik secara langsung kepada pemda setempat maupun secara tertulis dengan surat yang ditujukan langsung kepada instansi satuan kerja perangkat daerah;
- melakukan pengumpulan data awal potensi Piutang daerah maupun Piutang K/L dengan bekerjasama dengan Kanwil Perbendaharaan untuk memperoleh data awal Piutang KL maupun Pemda

Realisasi IKU ini adalah sebesar 140,85% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. IKU Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

K-Three	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	135,17%	132,50%	132,50%	141,95%	141,95%	140,85%	140,85%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 21. Raw Data Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1		35	
Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Kompoen 2	400	474	140,85%
Jumlah BKPN Diselesaikan Komponen 3		0	

### IKU 5.2: Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam

rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal akan sangat dipengaruhi norma waktu pelayanan penilaian, akurasi data pelayanan penilaian, dan nilai kaji ulang laporan penilaian.

Adapun capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian adalah 108,30% dari target 70%, dengan Indeks Realisasi adalah 120%. Capaian ini diperoleh dari Komponen Norma waktu penilaian (40%), Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%) dan Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%), dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 22. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

K-Three	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	111,62%	110,17%	110,17%	108,17%	108,17%	108,30%	108,30%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud dikarenakan Pasar properti (belum ter-*capture* dengan baik), Sistem aplikasi (dalam tahap pengembangan), dan Data dan informasi (masih terdapat data yang perlu dilengkapi dan dicari). Dalam rangka menghadapi tantangan dimaksud, KPKNL Jakarta IV melakukan Sosialisasi kepada stakeholder terkait penilaian- Pemenuhan kompetensi Penilai melalui diklat- Updating peraturan di bidang Penilaian- Monitoring, input SIP dan SIP-ABMN- Melanjutkan pola kerja penilaian secara individu maupun tim- Melanjutkan pelaksanaan penilaian sesuai SOP.

### IKU 5.3: Presentase Produktivitas Lelang

Persentase Produktivitas Lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Target persentase produktivitas lelang KPKNL Jakarta IV pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 97,30% diperoleh dari perhitungan indeks laku per jenis lelang 87,99% dan indeks frekuensi lelang 103,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. IKU Presentase produktivitas lelang

K-Three	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Presentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	35,60%	58,34%	58,34%	76,48%	76,48%	97,30%	97,30%	
Capaian	120%	120%	120%	109,26%	109,26%	120%	120%	

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain dikarenakan tingkat daya laku lelang eksekusi yang rendah atau masih banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP) khususnya lelang eksekusi hak tanggungan, Aset milik pihak ketiga sulit dieksekusi melalui lelang harta pailit karena disyaratkan adanya dokumen asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik terpailit, yang ternyata pada prakteknya sulit dipenuhi oleh pemohon lelang Kurator.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan yang ada, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku.
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Mengajukan usulan perubahan PMK 122 Tahun 2023 khususnya pengecualian persyaratan dokumen berupa asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik terpailit dikecualikan Aset pihak ketiga yang terikat jaminan kebendaan dari Kreditur Separatis, Jika perlu, ditambahkan dokumen berupa Surat Pernyataan dari Kreditur Separatis bahwa telah menyerahkan secara sukarela pemberesan harta pailit kepada Kurator melalui eksekusi lelang dan akan bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana dari pemilik jaminan obyek lelang
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Jakarta IV.

## 6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif.

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada

stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

### **IKU 6.1: Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi. Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal. Indeks kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target tahun 2025 dengan nilai 100, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 24. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran*

K-Three	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

### **IKU 6.2: Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa**

Meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan/DJKN/KPKNL. Indeks ini mengukur Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing* Katalog, *Non e-Tendering* dan *Non e-Purchasing*, dan e-Kontrak, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa dan peraturan Kepala LKPP. Adapun capaian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 25. IKU Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa

K-Three	6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	160	145,71	145,71	135	135	125,22	125,22	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

### IKU 6.3: Presentase pengembangan kompetensi pegawai

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 adalah sebesar 98%. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Tantangan dalam rangka pencapaian IKU ini adalah masih terdapat pegawai yang tidak mengusulkan pelatihan secara mandiri, sehingga kemungkinan dipanggil pelatihan menjadi kecil. Hal ini dihadapi dengan mengimbau pegawai untuk aktif dalam mengajukan usulan diklat serta melakukan sosialisasi dan edukasi berkala terhadap pegawai melalui nota dinas, broadcast whatsapp ataupun sosialisasi secara langsung. Adapun pada tahun 2025, realisasi capaian IKU pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Jakarta IV mencapai 98% dari target 80%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. IKU Presentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Three	6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Presentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	29%	74%	74%	86%	86%	98%	98%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### 7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif

Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

### **IKU 7.1: Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Pada Tahun 2025, capaian IKU dimaksud adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 27. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum*

K-Three	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	114,91	114,50	114,50	112,73	112,73	113,98	113,98	
Capaian	114,91	114,50	114,50	112,73	112,73	113,98	113,98	

*Tabel 28. Rincian Penanganan Permasalahan Hukum*

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan		111.,76	
	100		113,98
Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap		122,84	

### **IKU 7.2: Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)**

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada

Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat I.

Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kementerian Keuangan wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap melalui nota dinas dan/atau e-mail, selanjutnya PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui nota dinas dan/atau e-mail paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dan/atau email permohonan dari PPID Kementerian Keuangan. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi melalui e-mail, surat, telepon, dan aplikasi E-PPID.

Tabel 29. IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

K-Three	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/AVG
Realisasi	115	116	116	115,33	115,33	115,25	115,25	
Capaian	115	116	116	115,33	115,33	115,25	115,25	

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pencapaian IKU ini dikarenakan Terdapat perbedaan pendapat/pandangan terhadap batasan Informasi dikecualikan, walaupun sudah terdapat Keputusan Menkeu terbaru, sehingga dibutuhkan konfirmasi kepada Direktorat Hukum dan Humas untuk memastikan bahwa pejabat informasi patuh terhadap keputusan. KPKNL Jakarta IV melakukan pembaharuan glosari pengetahuan Informasi Publik dari pejabat PPID, dan berkoordinasi dengan direktorat Hukum dan Humas apabila terjadi pengajuan keberatan dalam rangka menghadapi tantangan dimaksud.

#### 8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

##### IKU 8.1: Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Manajemen Risiko bertujuan dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di

lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Pengelolaan kinerja merupakan kegiatan yang menyeluruh dari sejak penyusunan anggaran, pelaksanaan dalam pencapaian target sampai dengan pelaporan pengelolaan kinerja dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan kinerja ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak bukti dokumen yang menunjang pembuktian pelaksanaan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kualitas manajemen risiko yang membutuhkan support dokumen dan pelaksanaan diklat oleh pegawai di luar seksi KI mengakibatkan sulitnya mendapatkan nilai yang optimal.

Tabel 30. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

K-Three	8.Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	100	99,86	99,86	99,91	99,91	97	97	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

### IKU 8.2: Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel 31. IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

K-Three	8.Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	131,71	131,71	
Capaian	100	100	100	100	100	120	120	

### C. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2025 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan jumlah sebesar Rp2.856.471.000,00 tersebut pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.327.028.526,00 atau sebesar 81,47% dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 32. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja Berdasarkan Online Monitoring SPAN Per 31 Desember 2025

No	Program	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja pegawai	0	0	0
2.	Belanja Barang	2.569.442.000	2.177.109.926	84.73
3.	Belanja Modal	287.029.000	149.918.600	52.23
<b>Jumlah</b>		<b>2.856.471.000</b>	<b>2.327.028.526</b>	<b>81,47</b>

Pada tahun 2025 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran sama dengan tahun 2025. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 50\%) + (\text{SMART DJA} \times 50\%)$$

Tabel 33. IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN Per 31 Desember 2025

No	Indikator IKPA	Bobot	Nilai	Capaian
<b>A. Nilai IKPA</b>				
1.	Revisi DIPA	10	100	98,85

2.	<b>Deviasi Hal III DIPA</b>	15	100
3.	Penyerapan Anggaran	19,09	95,47
4.	<b>Belanja Kontraktual</b>	10	100
5.	Penyelesaian Tagihan	10	100
6.	<b>Pengelolaan UP dan TUP</b>	10	100
7.	Capaian Output	25	100
<b>B. Nilai SMART</b>			<b>100</b>
<b>Capaian Tahun 2025</b>			<b>120</b>

#### D. Penghargaan

Pada Tahun 2025, KPKNL Jakarta IV menerima penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan Kinerja Penilaian Terbaik III di Lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.



Gambar 4. Sertifikat Penghargaan KPKL dengan Kinerja Layanan Penilaian Terbaik III



04.

Penutup

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta IV sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Jakarta IV telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Jakarta IV senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. **Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2025 yang sangat baik dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta IV mencapai 116,80%.**

### B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta IV mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.



Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV. Laporan Kinerja tahun 2025 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Jakarta IV pada periode berikutnya.



**Lampiran**



Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja (berdasarkan surat KemenPAN RB B/37/AA.01/2025)

Tabel 34. Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	SS 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						
	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder				100%	120%	120%
	1b-CP Indeks Integritas				100	105,32	105,32
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				100%	120,03%	120%
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	Rp43.015.000,00	Rp38.608.500,00	89,76%			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	Rp93.786.000,00	Rp92.027.424,00	98,12%			

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	SS 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp247.769.000,00	Rp245.555.366,00	99,11%	100%	120%	120%
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang Pelayanan Publik Lainnya Risalah Lelang	Rp45.000.000,00	Rp43.500.000,00	96,67%	100%	93,02%	93,02%
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp186.432.000,00	Rp185.426.343,00	99,46%	100%	113,22%	113,22%
3	SS 3: Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rp43.015.000,00	Rp38.608.500,00	89,76%	74	117,50	120%



No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang						
4	SS 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif						
	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	Rp12.909.000,00	Rp12.043.098	93,29%	100%	120,45%	120%
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp14.274.000,00	Rp10.058.000,00	70,65%	100%	120%	120%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset						
5	SS 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara						
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset Peraturan Lainnya Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp186.432.000,00	Rp185.426.343,00	99,46%	100%	140,85%	120%
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian						
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp23.180.000,00	Rp22.876.000,00	98,69%	70%	108,30%	120%
	5c-CP Persentase produktivitas lelang	Rp12.046.000,00	Rp11.490.224,00	95,39%	80%	97,30%	120%



No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Penggalan Potensi Lelang						
6	SS 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran				100	120	120%
	6b-CP Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa				100	125,22	120
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai				80%	98%	120%
	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal Kerumahtanggaan Layanan Perkantoran Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp1.615.328.000,00	Rp1.601.016.716,00	99,11%			
7	SS 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	Rp82.108.000,00	Rp81.496.855,00	99,26%	100	113,98	113,98%
	Program Dukungan Manajemen Legislasi dan Litigasi						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Layanan Bantuan Hukum Pelaksanaan Advokasi Hukum						
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)						
	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Komunikasi Publik Kehumasan	Rp10.062.000,00	Rp9.770.224,00	97,10%	80	115,25	120%
8	SS 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko						
	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp12.322.000,00	Rp7.664.000,00	62,20%	80	97	120%
	8b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.615.328.000,00	Rp1.601.016.716,00	99,11%	100	131,71	120%



No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal Kerumahtanggaan Layanan Perkantoran Peralatan Fasilitas Perkantoran						

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
KPKNL JAKARTA IV  
Periode s.d Triwulan IV 2025**

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-								114,07	114,07
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	29,79%	120,00	120,00	35,74	
1b-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	40,43%	105,32	105,32	42,58	
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	120,03%	14,00%	29,79%	120,03	120,00	35,74	
<b>Customer Perspective (20%)</b>											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								108,32	114,16
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	120,00%	19,00%	36,54%	120,00	120,00	43,85	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	93,02%	19,00%	36,54%	93,02	93,02	33,99	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	113,22%	14,00%	26,92%	113,22	113,22	30,48	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	120,00
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	117,50	14,00%	100,00%	158,78	120,00	120,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								120,00	120,00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	120,45%	14,00%	50,00%	120,45	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120,00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	140,85%	14,00%	33,33%	140,85	120,00	40,00	120,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	108,30%	14,00%	33,33%	154,71	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	97,30%	14,00%	33,33%	121,62	120,00	40,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	119,00
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	125,22	14,00%	33,33%	125,22	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	98,00%	14,00%	33,33%	122,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								116,99	119,00
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	113,98	14,00%	50,00%	113,98	113,98	56,99	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	115,25	14,00%	50,00%	144,06	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								120,00	116,80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,00	14,00%	50,00%	121,25	120,00	60,00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	131,71	14,00%	50,00%	131,71	120,00	60,00	
<b>NKO</b>											<b>116,80</b>

Kepala KPKNL Jakarta IV,



Ditandatangani secara elektronik  
Bambang Sulistyono





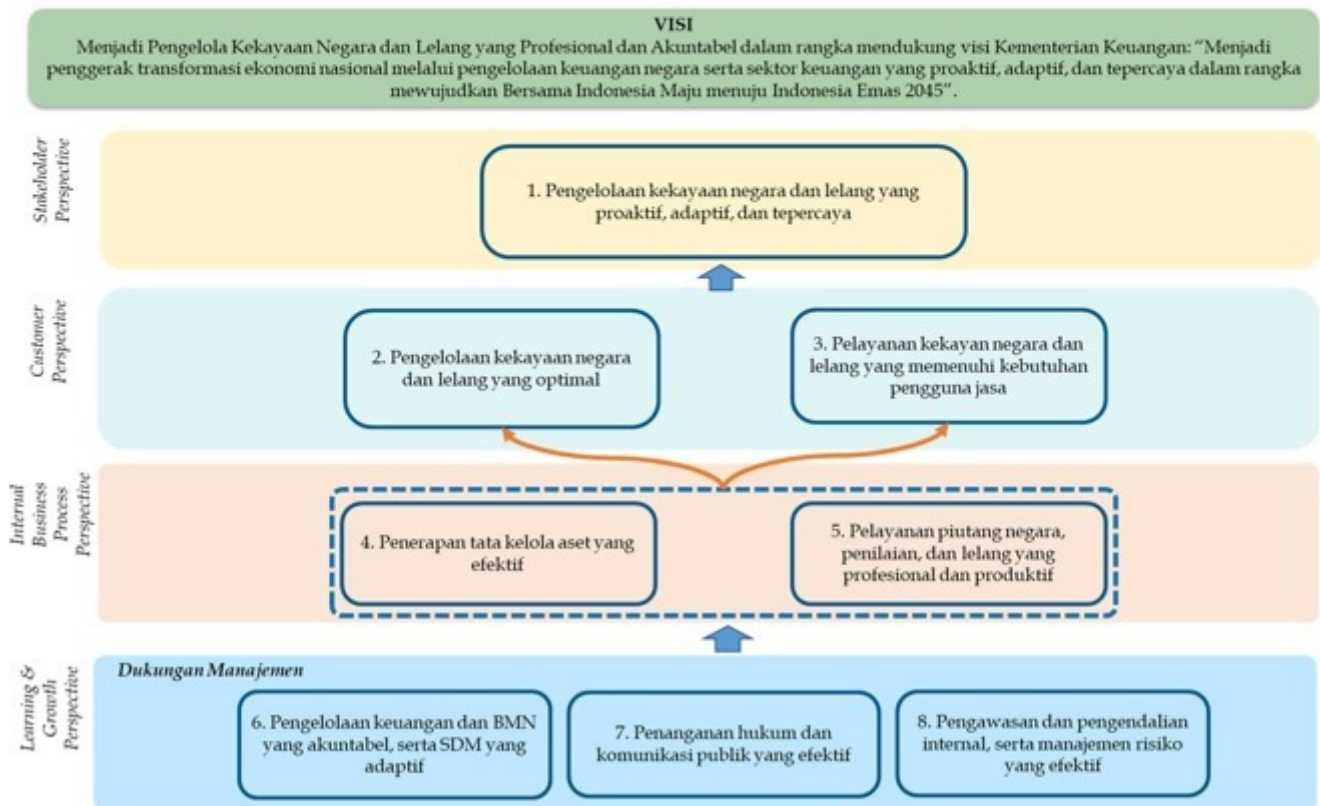
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-4/WKN.07/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAKARTA IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JAKARTA IV  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp85,9M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp652M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp200M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



**Program/Kegiatan 2025****Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp861,173,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp97,655,000
2. Pengelolaan Aset Rp763,518,000

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp1,746,529,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp70,504,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp1,636,687,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp19,124,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp20,214,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara DKI JakartaDitandatangani Secara Elektronik  
Arif Bintarto YuwonoKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Jakarta IVDitandatangani Secara Elektronik  
Rofiq Manshur

**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAKARTA IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp85,9 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp652M )
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp200M )
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rofiq Manshur



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rofiq Manshur



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Rofiq Manshur		NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	19750725 199903 1 001		NIP	19710912 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp85,9M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp652M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp200M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono  
19710912 199703 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Manshur  
19750725 199903 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp85,9M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp652M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp200M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono

19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Manshur

19750725 199903 1 001





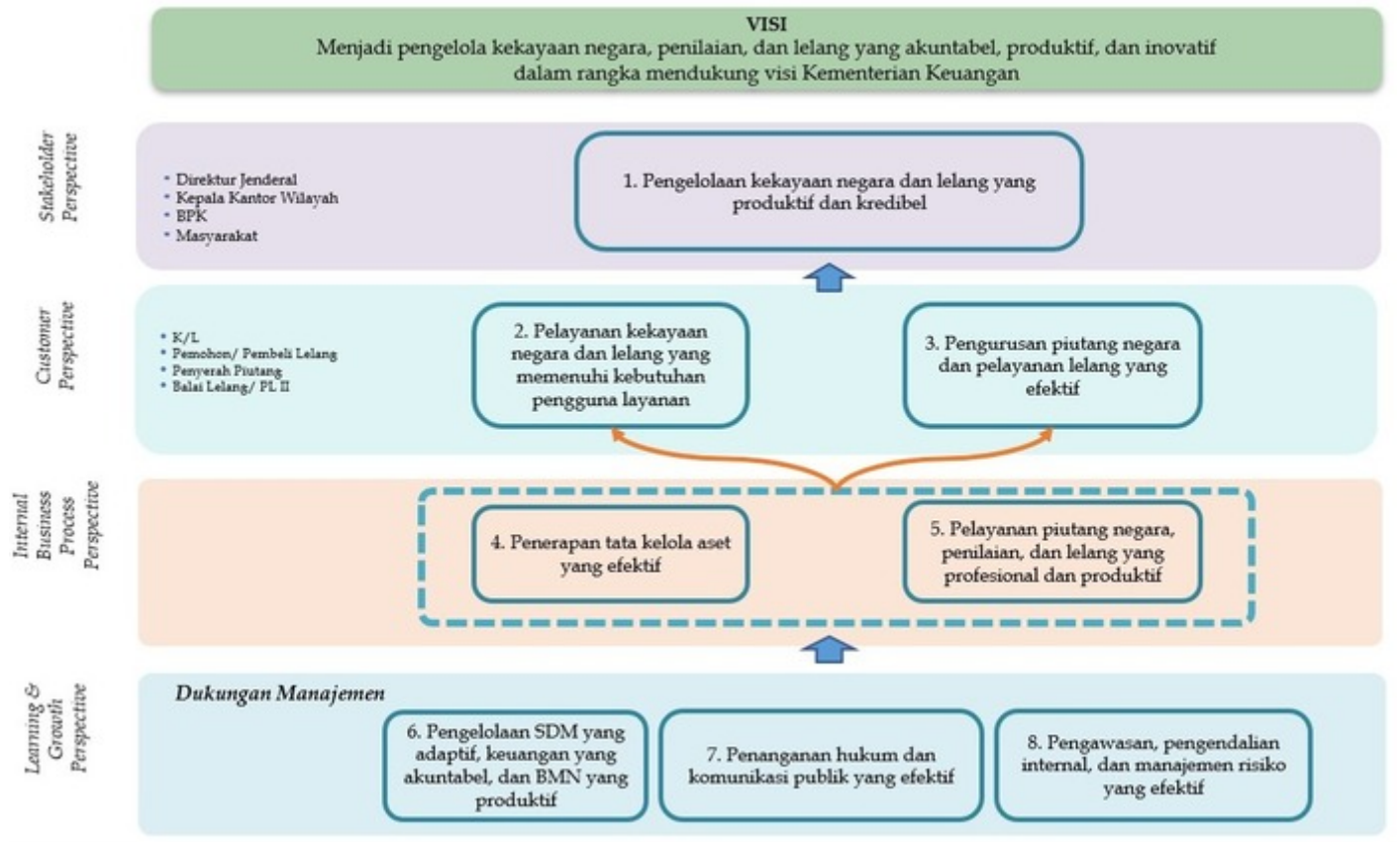
**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-4/WKN.07/2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JAKARTA IV  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JAKARTA IV  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp79,5M)
2	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp240M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp491,8M)
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp1,202,901,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp131,672,000
2. Pengelolaan Aset	Rp1,701,229,000
Program:	
Dukungan Managemen	Rp1,626,114,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp70,504,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,517,170,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp16,610,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21,830,000

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dodok Dwi Handoko

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bambang Sulistyono



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAKARTA IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp79,5 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan</b>							
2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp240M )
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp491,8 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bambang Sulistyono



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bambang Sulistyono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bambang Sulistyono		NAMA	Dodok Dwi Handoko
NIP	19710809 199703 1 001		NIP	19750815 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp79,5M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp240M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp491,8M)	Penerima Layanan
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Bambang Sulistyono  
19710809 199703 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko  
19750815 199503 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	41 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp79,5M)
2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp240M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp491,8 M)

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bambang Sulistyono  
19710809 199703 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko  
19750815 199503 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*





# H.E.B.A.T

Harmonis - Empatik - Berkelanjutan - Adaptif - Terpercaya

**KPKNL**  
JAKARTA IV



Akses Cepat Layanan  
KPKNL Jakarta IV





**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA